

BAB VI

SARAN

1. Sebelum melaksanakan PKPA, hendaknya calon apoteker membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, undang-undang kefarmasian serta manajemen apotek sehingga pada saat melaksanakan PKP calon apoteker dapat secara langsung mengaplikasikan ilmu tersebut secara efektif dan efisien.
2. Mahasiswa calon apoteker harus belajar ilmu mengenai komunikasi agar dapat berkomunikasi dengan pasien sehingga dapat menyampaikan informasi tentang penggunaan obat yang rasional dengan baik.
3. Mahasiswa calon apoteker hendaklah aktif dan kreatif selama menjalani PKPA sehingga memiliki bekal dalam memasuki dunia kerja selanjutnya.
4. Penyediaan tempat khusus untuk konseling sangat memberikan keuntungan bagi pasien karena pasien dapat menginformasikan tentang keluhan yang dirasakannya dan obat-obat yang sudah di gunakan tanpa diketahui orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Aminder, S., Jha, K.K., Mittal, A., Kumar, A., A Review On : Telmisartan, 2013, *Journal Of Scientific & Innovative Research*, 1 (2) : 160-175.

Mims.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2013, *Pedoman Pengelolaan Prekursor Farmasi Dan Obat Mengandung Prekursor Farmasi No. 40*, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2014, *Informasi Obat Nasional Indonesia*, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2018, *Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tentang Pengawasan, Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian No. 4*, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Depkes RI, 2007, *Pedoman Penggunaan Obat Bebas Dan Bebas Terbatas*, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Frank S, 2017, *Drug Doses 17th Edition*, Department of Padiatrics, Australia.

Katzung, B.G and Trevor J.A,. 2011. *Basic And Clinical Pharmacology 13th Edition*, New York: McGraw-Hill.

Menkes RI, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Apotek Nomer 9*, Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menkes RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Nomer 73*, Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menkes RI, 1990, *Obat Keras Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep Dokter Oleh Apoteker Di Apotek (Obat Wajib Aptek No.1)* , Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menkes RI, 1993, *Obat Keras Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep Dokter Oleh Apoteker Di Apotek (Obat Wajib Aptek No.2)* , Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menkes RI, 1999, *Obat Keras Yang Dapat Diserahkan Tanpa Resep Dokter Oleh Apoteker Di Apotek (Obat Wajib Aptek No.3)* , Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

McEvoy, Gerald K., et al., 2011, *AHFS Drug Information*, American Society of Health-System Pharmacist, Bethesda, Maryland.

Pemerintah RI. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesehatan Nomer 36*, Jakarta: Presiden Republik Indonesia

Pemerintah RI. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika Nomer 35*, Jakarta: Presiden Republik Indonesia

Stockley, IH., 2009, *Stockley's Drug Interaction*, Eighth Edition, Pharmaceutical Press, London.